

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan proses pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit pemerintahan yang lebih rendah. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan (1945–1949), ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (Lestari, 2023). Dalam pelaksanaan desentralisasi, perencanaan pembangunan merupakan salah satu kewenangan yang wajib dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan Pembangunan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menjalankan kewajiban penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta statistic (Pane et al., 2021). Sebagai lembaga yang berperan dalam merancang dan merencanakan pembangunan daerah, BAPPEDA bertanggung jawab untuk menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kompleksnya tugas yang diemban oleh BAPPEDA membutuhkan perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat, termasuk alokasi anggaran yang cukup. Dalam hal ini, kondisi keuangan BAPPEDA memainkan peranan yang sangat penting. Keberhasilan dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan tidak berpatokan pada strategi dan kebijakan yang disusun, melainkan pada ketersediaan dan pengelolaan anggaran yang memadai. Kondisi keuangan yang sehat akan memungkinkan BAPPEDA untuk melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih efektif guna meningkatkan komitmen organisasi, akan meningkatkan pula akuntabilitas publik dan keberhasilan pengelolaan keuangan, sementara kondisi keuangan yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian tujuan Pembangunan (Putri, 2022).

Keadaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan operasional, dan arus kas memerlukan pemahaman literasi serta ketahanan finansial yang memadai guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan keuangan di masa depan (Herawati et al., 2024). Penyelenggaraan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Seiring dengan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, peran lembaga keuangan menjadi semakin vital dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari (Musmini & Devi, 2024). Mengetahui kondisi keuangan tersebut penting bagi masyarakat untuk memastikan transparansi pengelolaan dana, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan public (Wiguna & Dewi, 2024). Adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, akan dapat

mempertanggung jawabkan secara tepat sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku, sehingga laporan keuangan sebagai cerminan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan dan disajikan tepat waktu (Rustiarini et al., 2024). Laporan keuangan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan pemerintah daerah pada suatu titik waktu tertentu, serta menggambarkan aktivitas keuangan yang terjadi selama periode pelaporan (Andi Kusnadi et al., 2022). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan BAPPEDA, analisis terhadap laporan keuangan penting untuk dilakukan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu memahami laporan keuangan serta menafsirkan angka-angka yang terdapat di dalamnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan menggunakan informasi keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Alrahim & Wibowo, 2022). Dengan menganalisis laporan keuangan BAPPEDA, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah dengan menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri adalah suatu perbandingan yang menghubungkan dua data akuntansi, yang diperoleh dengan membagi satu nilai dengan nilai lainnya (James C Van Horne, 1997). Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja organisasi. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan organisasi yang bersangkutan. Van Horne dan Walchowicz (2012) Menentukan empat rasio utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Berdasarkan pertimbangan relevansi dengan tujuan dan ketersediaan data dalam laporan keuangan BAPPEDA Provinsi

Bali, maka penelitian ini secara khusus menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang telah disesuaikan dengan pos-pos keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan BAPPEDA Provinsi Bali.

Rasio likuiditas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya (Litamahuputty, 2021). Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) Rasio likuiditas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, baik terhadap pihak eksternal (likuiditas badan usaha) maupun internal (likuiditas perusahaan). Oleh karena itu, rasio ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana guna membayar kewajiban saat ditagih (J. Fred Weston, 2004).

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (Ningsih, 2022). Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang, atau dengan kata lain, seberapa besar beban utang perusahaan jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya (Kasmir, 2021). Secara umum, rasio solvabilitas berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban hutangnya, baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama jika perusahaan harus dilikuidasi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan sejauh mana pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran

daerah, dengan mengacu pada sistem keuangan serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan anggaran yang telah dirancang dan disetujui sebelumnya (Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator keberhasilan yang mencerminkan hasil dari pengelolaan keuangan daerah, yang didasarkan pada pendapatan dan pengeluaran daerah dengan menggunakan perhitungan indikator keuangan (Mahesa & Astawa, 2024). Kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Bali pada periode 2021–2024 menunjukkan indikasi ketidaksehatan, khususnya dalam aspek likuiditas. Hal ini tercermin dari nilai aset lancar yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan liabilitas lancar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, aset lancar tercatat sebesar Rp232.686.912, yang hanya mampu menutupi sekitar 38,43% dari total liabilitas lancar sebesar Rp605.512.523. Kondisi ini memburuk pada tahun 2022, di mana aset lancar turun menjadi Rp154.203.836, sedangkan liabilitas lancar mencapai Rp595.444.909. Penurunan ini mengindikasikan melemahnya kemampuan BAPPEDA dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta meningkatnya risiko ketidakmampuan pembayaran tepat waktu. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perbaikan dengan peningkatan aset lancar menjadi Rp172.207.560 dan penurunan liabilitas lancar menjadi Rp545.614.041. Namun demikian, rasio likuiditas yang dihasilkan masih jauh di bawah standar ideal (minimal 125%), sehingga kondisi likuiditas tetap dikategorikan tidak sehat. Memasuki tahun 2024, aset lancar kembali menurun menjadi Rp150.775.395, sementara liabilitas lancar tercatat sebesar Rp521.572.751, yang menunjukkan bahwa kemampuan BAPPEDA dalam

memenuhi kewajiban jangka pendek tetap rendah. Secara keseluruhan, perbandingan antara aset lancar dan liabilitas lancar selama periode 2021–2024 secara konsisten memperlihatkan bahwa BAPPEDA Provinsi Bali mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan likuiditas. Ketidakseimbangan ini menandakan bahwa aset lancar yang ada belum optimal dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga diperlukan perhatian khusus dan langkah strategis guna meminimalkan risiko likuiditas di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang menganalisis laporan keuangan dilakukan oleh Dian Mawardi et al. (2022) dengan judul penelitian yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep *Value for Money*. Penelitian ini fokus pada pengamatan pelaksanaan anggaran kegiatan dengan menerapkan pengukuran value for money menggunakan tiga rasio 3E, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Diah Ariyani et al. (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Ekonomis, Efektivitas, serta Efisiensi pada BAPPEDA LITBANG Ponorogo. Sama seperti penelitian Dian Mawardi et al. (2022), pada penelitian ini juga menerapkan konsep *value for money* diukur melalui Rasio Ekonomis, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan terbatas hanya pada laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Triyunarni et al. (2021) dengan judul penelitian yaitu Analisis Laporan Keuangan Di Kantor Bappeda Kabupaten Lombok Barat, dilaksanakan dengan menggunakan rasio Likuiditas dan rasio Solvabilitas. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan operational sebagai instrument analisis,

Penelitian ini telah dapat memetakan kinerja keuangan BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat, Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah tersebut selama periode tiga tahun.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa gap yang belum dieksplorasi dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya terbatas pada penggunaan instrumen analisis yang hanya mengandalkan laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif terkait kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Triyunarni et al. (2021) memang telah menggunakan pendekatan rasio keuangan seperti rasio likuiditas dan solvabilitas, namun cakupan waktunya terbatas hanya pada tiga tahun serta dilakukan di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, terdapat gap penelitian dalam hal pendekatan, instrumen analisis, jangkauan analisis, khususnya pada pemanfaatan rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi pemerintah dalam periode yang lebih panjang dan dengan cakupan data laporan keuangan yang lebih luas.

Penelitian ini adalah kelanjutan atau pengembangan dari studi yang sebelumnya dilakukan oleh Triyunarni et al. (2021) yang menganalisis laporan keuangan di kantor BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan indeks rasio Likuiditas dan rasio Solvabilitas. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Triyunarni et al. (2021) terletak pada objek dan cakupan periode analisis. Fokus geografis penelitian Triyunarni et al. (2021) terbatas pada Kabupaten Lombok Barat, sementara penelitian ini akan memperluas analisis keuangan pada BAPPEDA Provinsi Bali, yang memiliki karakteristik dan tantangan

pengelolaan keuangan yang berbeda. Selain itu, pada penelitian Triyunarni et al. (2021) cakupan periode analisis terbatas hanya pada tiga tahun anggaran, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika jangka menengah yang terdapat di pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian ini akan memperluas cakupan periode analisis menjadi empat tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Dengan jangka waktu yang lebih lama, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tren dan perubahan kondisi keuangan, terutama pada aspek likuiditas dan solvabilitas, serta memungkinkan analisis yang lebih detail terhadap kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Bali secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021-2024 melalui analisis rasio likuiditas dan solvabilitas, guna mengevaluasi kemampuan instansi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Kondisi Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali Periode 2021-2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini terletak pada ketidakseimbangan kondisi likuiditas BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024, yang ditandai oleh aset lancar yang secara konsisten berada di bawah

liabilitas lancar. Ketimpangan ini menunjukkan adanya potensi risiko dalam kemampuan BAPPEDA dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu, kegagalan dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis kinerja keuangan instansi pemerintah seperti BAPPEDA dengan pendekatan rasio likuiditas dan solvabilitas dalam periode yang cukup panjang. Penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada penggunaan laporan realisasi anggaran saja atau memiliki cakupan waktu yang singkat, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait kondisi keuangan jangka menengah. Karena itu, dibutuhkan penelitian yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BAPPEDA melalui analisis rasio yang lebih luas dan relevan, guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, pembatasan masalah penting dilakukan karena topik yang dikaji memiliki cakupan yang luas dan Kemungkinan terkait dengan topik penelitian lain. Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada inti permasalahan, yaitu bagaimana kinerja keuangan BAPPEDA Provinsi Bali pada periode 2021-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh dari pembatasan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi likuiditas BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024 berdasarkan analisis rasio keuangan?
- b. Bagaimana tingkat solvabilitas BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024 dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang?
- c. Apa saja faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kondisi likuiditas BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024.
- b. Untuk tingkat solvabilitas BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024 dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
- c. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan antara aset lancar dan liabilitas lancar pada BAPPEDA Provinsi Bali selama periode 2021–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu di Bidang Keuangan Daerah:
Penelitian ini berpotensi memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan keuangan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang

berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

2. Pemahaman Lebih Mendalam Tentang Analisis Keuangan Daerah: Studi ini mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai analisis laporan keuangan daerah, terutama dalam konteks BAPPEDA, dan memperkenalkan berbagai metode analisis yang relevan untuk menilai kesehatan keuangan suatu instansi pemerintahan.
3. Penyusunan Kerangka Konseptual untuk Analisis Keuangan Pemerintah Daerah: Temuan dari penelitian ini dapat menambah sumber referensi bagi studi-studi berikutnya yang membahas analisis keuangan pada instansi pemerintah daerah lainnya, serta menjadi dasar dalam pengembangan kerangka konseptual terkait evaluasi kondisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi BAPPEDA Provinsi Bali: Studi ini dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi BAPPEDA dalam menilai dan menyempurnakan pengelolaan keuangan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah. Temuan-temuan penelitian dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan anggaran dan perencanaan keuangan yang lebih baik di masa depan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan

kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang berdasarkan pada analisis kondisi keuangan yang ada untuk memperbaiki alokasi dan penggunaan anggaran, serta memperkuat perekonomian daerah.

3. Bagi Stakeholders dan Pemangku Kepentingan: Penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan oleh stakeholders, seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk memahami lebih jauh mengenai kondisi keuangan BAPPEDA. Hal ini dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong terjadinya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi: Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti maupun akademisi yang ingin melanjutkan studi terkait keuangan pemerintah daerah, khususnya mengenai BAPPEDA dan instansi serupa. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan model analisis keuangan yang lebih komprehensif dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.